

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI E-BUDDY DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Disusun Oleh
RIZKA NISFUL LAILA RAMADHON
252020100161

Dosen Pembimbing : **Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si.**

Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2026

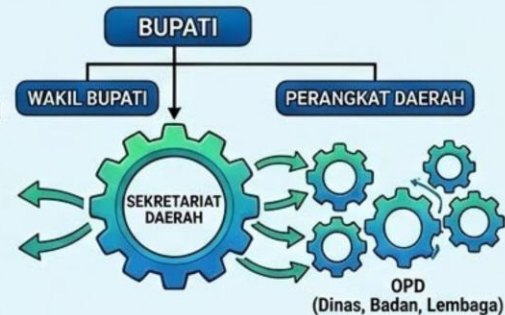


PENDAHULUAN

TRANSFORMASI DIGITAL ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH: INOVASI E-BUDDY DI KABUPATEN SIDOARJO

I. STRUKTUR & TANTANGAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH

- ❌ Duplikasi Kegiatan
- ❌ Tumpang Tindih Kewenangan
- ❌ Inefisiensi Anggaran
- ❌ Penurunan Kualitas Layanan



Peran Sekda sebagai penghubung vital Bupati-OPD.

II. PENTINGNYA ADMINISTRASI SURAT & PERAN TIK/SPBE

PENTINGNYA ADMINISTRASI SURAT MENYURAT:
Bukti Hukum & Dokumenter

Penerimaan → Distribusi → Disposisi → Pengarsipan

PERAN TIK & SPBE
Inpres 3/2003 (Awal E-Gov)
Perpres 95/2018 tentang SPBE

Efisiensi Kecepatan Respons Transparansi Akuntabilitas

III. PENCAPAIAN NASIONAL & SOLUSI INOVATIF E-BUDDY

PRESTASI SPBE INDONESIA
(UN E-Government Survey 2024)



Peringkat 64 dari 193 Negara
(Naik 13 Peringkat)
Masuk Kategori
"Very High E-Government
Development Index
(VHEGDI)"



1. Surat Masuk (Pencatatan & Distribusi)
2. Surat Keluar (Penyusunan & Pengiriman)
3. Disposisi Elektronik (Pengalihan Wewenang)
4. Persetujuan & TTE (Tanda Tangan Elektronik)
5. Pengarsipan Elektronik (Otomatis & Terorganisir)

Teks Dasar Hukum: Perbup Sidoarjo No 30/2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik

IV. MANFAAT HARAPAN IMPLEMENTASI E-BUDDY



TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
BERSIH



EFEKTIVITAS
& EFISIENSI
(Hapus Duplikasi)



TRANSPARANSI
&
AKUNTABILITAS



PELAYANAN
PUBLIK
BERKUALITAS
& RESPONSIF

GAP MASALAH

Berdasarkan data Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, volume surat mengalami peningkatan setiap tahun.

Tahun	Surat Masuk	Surat Keluar	Disposisi
2022	17.546	19.208	16.099
2023	18.576	18.488	87.007
2024	19.121	19.837	101.769

Tabel 1. *Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo*

Data tersebut menunjukkan tingginya intensitas pengelolaan surat sehingga dibutuhkan sistem elektronik yang mampu mendukung proses administrasi secara cepat dan akurat.

GAP MASALAH

GAP MASALAH IMPLEMENTASI E-BUDDY DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

INFOGRAFIS UNTUK SEMINAR PROPOSAL



KONDISI IDEAL:
ALIRAN CEPAT & TEPAT



REALITAS EMPIRIS:
ALIRAN TERHAMBAT

1 SUMBER SURAT
(OPD/INSTANSI)



KETIDAKKONSISTENAN
TEMPLATE & TATA NASKAH

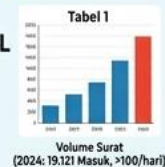
- Pemeriksaan Real-time Terhambat
- Pekerjaan Berulang (Edit Manual TU)
- Penumpukan (Subbag TU Pimpinan)

2 PUSAT (SETDA) - VERIFIKATOR



SISTEM E-BUDDY &
JARINGAN TIDAK STABIL

- Aplikasi Lambat
- Offline/Latency Tinggi
- Intervensi Waktu (Verval/Disposisi)



3 TANDA TANGAN
ELEKTRONIK (TTE)



INTEGRASI BSRE
BELUM OPTIMAL

- Pimpinan Kesulitan Penandatanganan
- Surat Terhambat (Belum TTE)

4 SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)



ADAPTASI TEKNOLOGI
RENDAH

- Pembuatan Surat Masih Manual
- Kesulitan Pimpinan Disposisi Sistem Digital
- Surat Tertahan di Pimpinan

5 ORGANISASI
& PROSEDUR



SOP TIDAK RELEVAN
& VERIFIKASI
BERJENJANG LAMA

- Prosedur Surat Lama
- Tanggung Jawab Tidak Jelas
- Hambatan Eskalasi

DAMPAK:
KETERLAMBATAN
DISTRIBUSI & TEPAT
WAKTU TERSUMBAT

- Efektivitas Koordinasi Menurun
- Undangan Mendesak Terganggu
- Inefisiensi Ganda (Gunakan WhatsApp)

SEJAK 2020

PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti (Tahun)	Dimensi/Variabel Penelitian	Hambatan Utama yang Diidentifikasi	Dampak/Indikasi Utama
Khofifatul Ummah & Isnaini Rodiyah (2023)	Komunikasi, SDM, Disposisi, Struktur Birokrasi	Hambatan substansial pada keempat dimensi yang dianalisis.	Implementasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan belum optimal; indikasi adanya masalah serupa di institusi lain.
Ayum Hanifah & Riris Dwi Rahmawati (2024)	Penggunaan Antar Institusi, Pemahaman Fitur, Hambatan Teknis Operasional	- Ketidakkonsistenan penggunaan E-Buddy antar institusi. - Kurangnya pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur sistem. - Hambatan teknis operasional.	Alur kerja pengelolaan surat terganggu.
Mukhammad Ulil Albab (2024)	Jaringan Internet, Kemampuan Adaptasi Pengguna	- Ketidakstabilan jaringan internet (aplikasi tidak dapat diakses, berjalan lambat). - Keterbatasan kemampuan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem digital.	Masalah jaringan dan adaptasi pengguna merupakan faktor penghambat utama yang signifikan.

RUMUSAN MASALAH & TUJUAN PENELITIAN

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi E-Government pada Pengelolaan Surat melalui Aplikasi E-Buddy di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo?

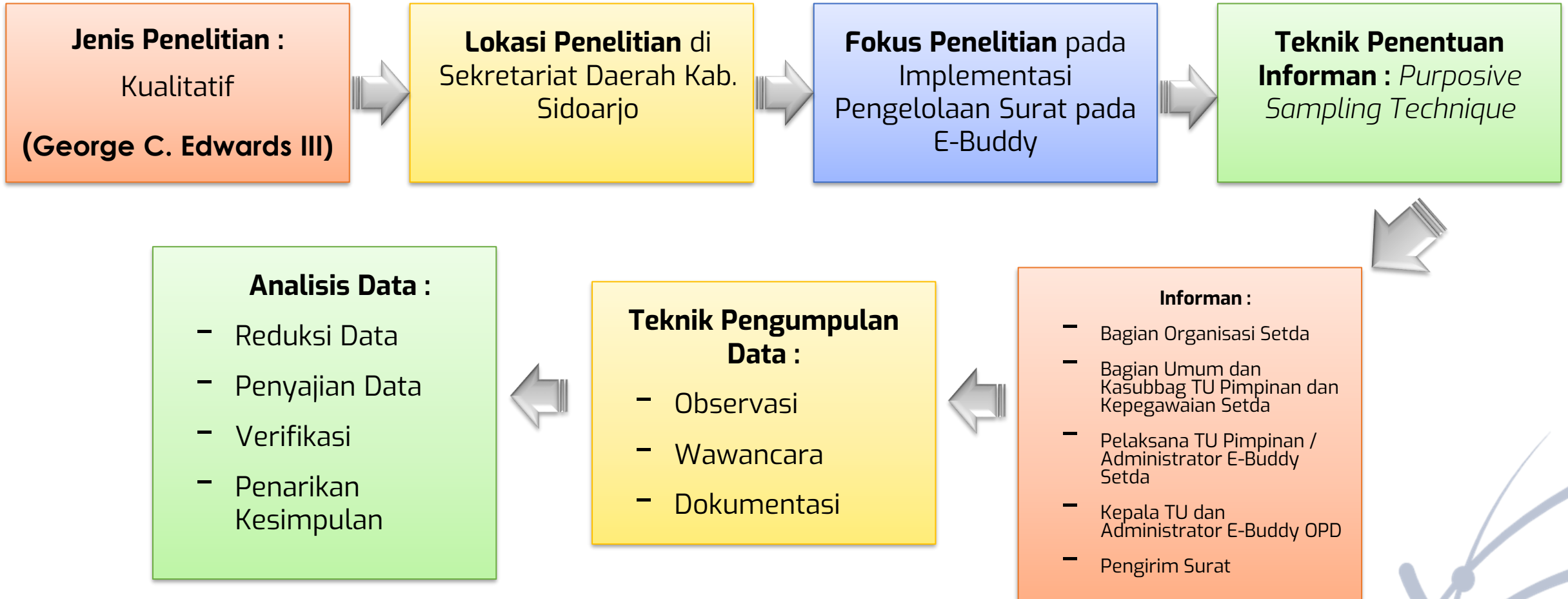


Tujuan Penelitian

Menganalisis implementasi pengelolaan surat pada aplikasi E-Buddy di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo



METODE PENELITIAN



TEORI

Teori George C. Edwards III menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui empat dimensi utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

01.

Komunikasi

Menekankan kejelasan instruksi dan konsistensi pesan dari pembuat kebijakan

02.

Sumber Daya

Mencakup ketersediaan personel terlatih, infrastruktur teknologi, dan anggaran memadai

03.

Disposisi

Mengukur komitmen pelaksana terhadap tujuan kebijakan

04.

Struktur Birokrasi

Menilai fragmentasi organisasi dan koordinasi antarunit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Menurut George C. Edwards III, komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, dimensi komunikasi dianalisis melalui tiga subdimensi, yaitu **transmisi, kejelasan, dan konsistensi**.

Transmisi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, seperti **bimbingan teknis, Zoom Meeting, YouTube, serta pendampingan langsung oleh Bagian Organisasi sebagai administrator utama E-Buddy**. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi telah dilakukan secara berkelanjutan sehingga seluruh perangkat daerah memperoleh informasi mengenai penggunaan aplikasi.



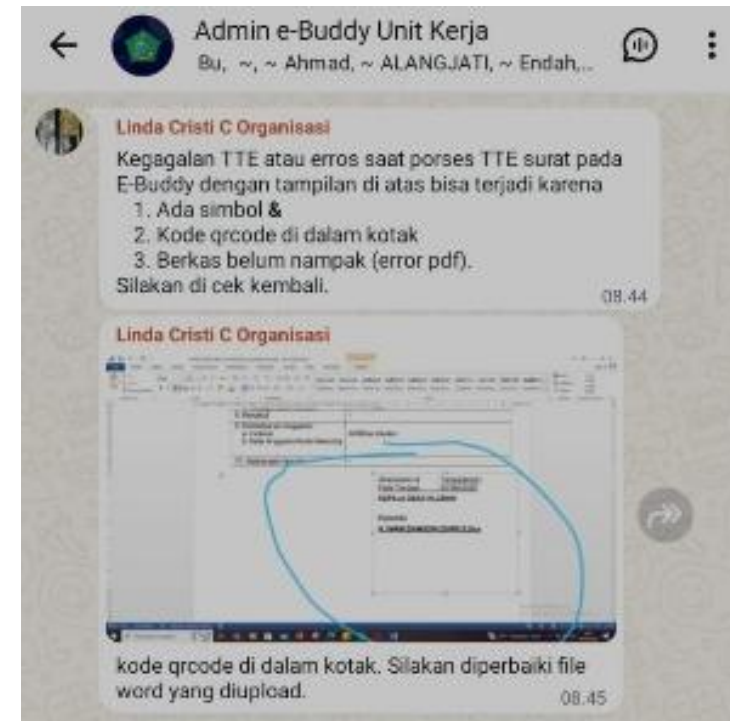
Namun demikian, proses transmisi belum berjalan secara optimal. Aparatur desa mengaku bahwa mereka lebih sering memperoleh informasi melalui administrator desa atau grup WhatsApp dibandingkan memahami langsung ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi masih bergantung pada media informal sehingga terdapat potensi perbedaan pemahaman antar pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejelasan

Dasar hukum implementasi E-Buddy telah jelas, yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik yang mengatur penyusunan surat, disposisi, tanda tangan elektronik, dan pengarsipan dokumen.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa sebagian besar desa belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi secara rinci. Akibatnya, aparaturnya lebih banyak mengikuti arahan administrator daripada memahami prosedur secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat perbedaan praktik administrasi di setiap unit kerja.



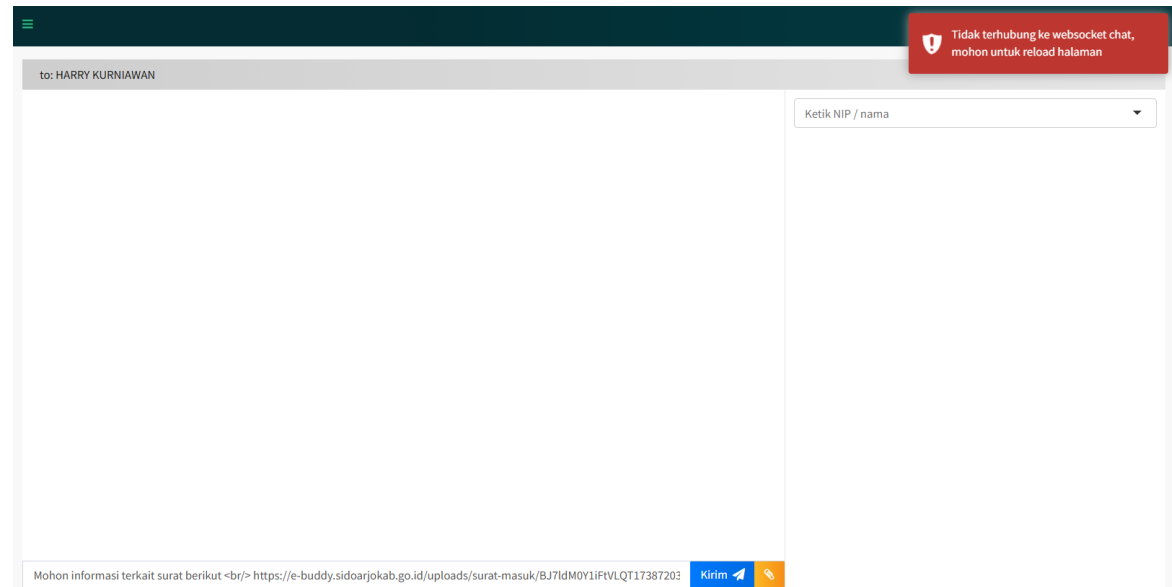
Gambar. Tangkapan Gambar Penginformasian E-Buddy melalui Grup WhatsApp Admin

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo utamanya Sekretariat Daerah secara konsisten menetapkan E-Buddy sebagai aplikasi resmi pengelolaan surat sejak tahun 2020. Seluruh perangkat daerah diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut dalam proses administrasi persuratan.

Namun dalam praktiknya, ketika aplikasi mengalami gangguan jaringan, server lambat, atau tanda tangan elektronik tidak dapat diproses, aparatur kembali menggunakan prosedur manual dan berkomunikasi melalui WhatsApp. Selain itu, beberapa fitur komunikasi internal dalam aplikasi tidak lagi dimanfaatkan sehingga koordinasi lebih banyak dilakukan melalui media eksternal.



Gambar. Fitur chat pada E-Buddy yang sudah tidak dimanfaatkan/berfungsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya

Dimensi sumber daya dianalisis melalui empat subdimensi, yaitu **sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, dan sarana prasarana.**

Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sidoarjo telah memiliki administrator E-Buddy mulai tingkat kabupaten hingga desa. Administrator bertugas melakukan verifikasi surat, memberikan pendampingan teknis, serta memastikan kesesuaian tata naskah dinas.

Namun, kemampuan aparatur belum merata. Pegawai baru, khususnya non-ASN di desa, belum seluruhnya memiliki akun E-Buddy dan sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan resmi. Mereka lebih banyak belajar melalui pendampingan rekan kerja atau administrator. Frekuensi pelatihan juga masih sekitar satu kali setiap tahun sehingga belum cukup mengikuti perkembangan fitur aplikasi.

Tabel 3.1 *Frekuensi Pelatihan/Sosialisasi E-Buddy di Tingkat Desa*

Tahun	Bentuk Kegiatan	Frekuensi Pelatihan	Frekuensi Ideal
2022	Bimtek/Sosialisasi via Zoom/Youtube	1 kali/tahun	2-3 kali/tahun
2023		1 kali/tahun	2-3 kali/tahun
2024		1 kali/tahun	2-3 kali/tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan anggaran untuk pengembangan aplikasi, pemeliharaan sistem, sosialisasi, dan kerja sama dengan pengembang aplikasi. Implementasi E-Buddy juga menghasilkan efisiensi penggunaan kertas, ATK, pencetakan dokumen, dan pengiriman surat manual.

Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa anggaran masih perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas server, penguatan jaringan internet, pengembangan fitur aplikasi, dan integrasi dengan BSR E.

Kewenangan

Pembagian kewenangan telah diatur secara jelas. Bagian Organisasi menjadi administrator utama, sedangkan OPD, kecamatan, dan desa memiliki administrator masing-masing. Administrator berwenang melakukan verifikasi sebelum surat diteruskan kepada pimpinan.

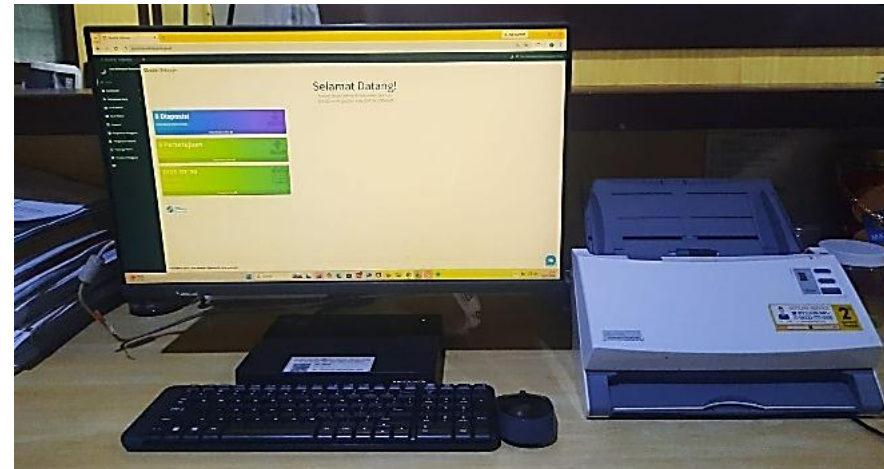
Namun, di tingkat desa kewenangan penggunaan aplikasi masih terpusat pada administrator sehingga aparatur lain yang belum memiliki hak akses harus bergantung kepada administrator untuk memproses surat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sarana Prasarana

Sekretariat Daerah telah menyediakan komputer, printer, scanner, dan jaringan internet untuk mendukung implementasi E-Buddy.

Namun, penelitian menemukan adanya kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil, kapasitas server yang terbatas, serta integrasi BSR E yang belum optimal sehingga proses verifikasi dan penandatanganan elektronik sering tertunda.



Gambar. Sarana Prasarana Admin E-Buddy

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disposisi

Komitmen Pimpinan & Administrator

Pimpinan mendukung implementasi E-Buddy melalui arahan penggunaan aplikasi, fasilitasi bimbingan teknis, serta memberikan contoh penggunaan disposisi dan tanda tangan elektronik. Administrator juga berkomitmen memastikan setiap surat telah sesuai tata naskah dinas sebelum diteruskan kepada pimpinan.

Sikap Aparatur

Aparatur memahami manfaat E-Buddy, seperti mempercepat administrasi, mempermudah pencarian arsip, dan meningkatkan keamanan dokumen. Namun, sebagian aparatur masih mempertahankan kebiasaan menggunakan prosedur manual atau WhatsApp ketika aplikasi mengalami gangguan, serta masih terdapat rasa kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi karena keterbatasan kemampuan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi

Implementasi E-Buddy melibatkan pemerintah desa, kecamatan, OPD, hingga Sekretariat Daerah sebagai administrator kabupaten. Pembagian tugas pada setiap tingkatan telah ditetapkan dengan jelas sehingga mendukung koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Namun, pada tingkat OPD dan Sekretariat Daerah, proses surat harus melewati beberapa tahapan verifikasi sebelum memperoleh persetujuan akhir. Struktur yang berjenjang ini menjamin akuntabilitas, tetapi juga berpotensi memperlambat penyelesaian surat apabila salah satu tahapan mengalami keterlambatan.

SOP

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020, tetapi pada tingkat pelaksana masih belum tersedia SOP teknis yang rinci dan seragam. Kondisi tersebut menyebabkan variasi praktik administrasi antarunit kerja dan pengguna lebih banyak mengandalkan arahan administrator dalam pelaksanaan sehari-hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi E-Buddy di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan cukup baik.

Keempat dimensi menurut George C. Edwards III telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa kendala, dimensi komunikasi telah berjalan **cukup efektif**, namun belum optimal. Kendala utama terletak pada belum tersedianya SOP teknis yang seragam, dominasi komunikasi melalui media informal, serta belum konsistennya penggunaan aplikasi ketika terjadi gangguan teknis. Dimensi sumber daya **cukup memadai**, tetapi belum optimal karena masih terdapat kesenjangan kompetensi SDM, keterbatasan hak akses, serta kendala infrastruktur digital. Komitmen pimpinan dan administrator **tinggi**, tetapi perubahan budaya kerja digital pada aparatur masih berlangsung sehingga disposisi dinilai **baik namun belum optimal**. Struktur birokrasi telah mendukung implementasi E-Buddy melalui pembagian kewenangan yang jelas. Namun, kompleksitas alur verifikasi dan belum seragamnya SOP masih menjadi tantangan dalam meningkatkan implementasi.

Dengan demikian, implementasi E-Buddy dapat dikatakan **cukup efektif**, tetapi masih memerlukan berbagai upaya penyempurnaan agar tujuan digitalisasi administrasi pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- [1] Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Albab, M. U., & Agustina, I. F. (2023). *Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Buddy Sidoarjo Di Desa Kedungrejo*. Application Repository.
- [3] Annisa, S., & Rayyan, F. (2024). *Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Mewujudkan E-Government*. Bridge Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi, 23, 8-16.
- [4] Azizah, M., Solikhin, S., & Lailiyah, N. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam Mendukung Pelayanan Administrasi*. Ngaos Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 22, 80-94.
- [5] Choiriyah, I. U., & Ummah, K. (2023). *Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo E-Buddy: Studi Kasus Pemerintah Desa Kajeksan*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal, 6(1), 519-532.
- [6] Djabbari, M. H., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). *Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Berbasis Website Di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka*. Kolaborasi Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 158-170.
- [7] Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika, 21(1), 33-54.
- [8] Hanifah, A., & Rodiyah, I. (2024). *Implementasi Penataan Naskah Dinas Elektronik Melalui E-Buddy di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Publications.
- [9] Ikram, M. (2019). *Pentingnya Administrasi Dalam Organisasi Pemerintah*. Jurnal Administrasi Negara, 15(2), 120-135.
- [10] Kementerian PANRB. (2023). *Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

